Bagian 1
INTRODUKSI DISIPLIN ILMU POLITIK

BAB I
PENDEFINISIAN DAN PENDEKATAN STUDI ILMU POLITIK

1.1 Definisi Ilmu Politik

Dalam literatur ilmu politik kita jumpai begitu banyak definisi ilmu politik yang diberikan oleh para pakar ilmu dibidang ini. Hal ini disebabkan karena para pakar mempunyai sendiri latar belakang keahlian dan pendekatan dibidang ilmu politik Dalam buku pengantar ini kita akan menjumpai berbagai definisi dari pendekatan yang berbeda misalnya dari segi institusi politik, filsafat, sistem politik, tingkah laku politik dan lain sebagainya. Sampai sekarang kita bisa memberikan penggolongan dari sekian banyak definisi itu dalam tiga ketegori, yaitu :

1. dari segi pendekatan power atau kekuasaan politik,
2. dari segi tingkah laku politik dan
3. dari segi sistem atau lembaga politik, dan
4. dari segi proses dan kepentingan negara.

Penulisan buku ini terpaut pada definisi yang keempat yaitu dari segi proses dan kepentingan dan

kehidupan negara. Oleh karena itu kita memilih definisi dari Prof.Dr. J. Barents dalam bukunya yang berjudul, " Pengantar Ilmu Politik" yang mengatakan ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari tentang penghidupan negara. Dari definisi itu terlihat dengan jelas pengertian penghidupan yang menggambarkan tentang bagaimana suatu negara lahir, bagaimana suatu negara memiliki tujuan negara dan bagaimana negara itu membangun sistem atau organisasi politiknya yang kita kenal dengan sistem politik, dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan itu. Kita belajar dari negeri negeri barat bagaimana negara itu berdiri dan berkembang dilandasi pemikiran filsafat yang berkembang saat itu, bagaimana pemikiran politik kemudian diterapkan, bagaimana perubahan politik terjadi.

Jadi pemilihan suatu definisi karena ada kebutuhan sebagai tonggak jalannya pemikiran, dari awal sebagai bagian dari tugas pengantar melewati arena bidang tugas yang begitu luas, jadi kita hanya terpaut dengan intisari atau bagian kecil yang bisa kita tampilkan dan kita akan pasti akan tiba di bagian penutup sebagai bagian tugas untuk meneruskan perjalanan pemikiran yang jauh kedepan, dengan perkataan lain tugas akademik, kita tutup dengan pemikiran filsafat yang lebih mendalam.

Jadi pertanyaan, apakah ilmu politik itu, maka jawaban yang tepat dan benar ialah menurut pendapat Prof Barents dalam bukunya yang berjudul, Pengantar Ilmu Politik mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang penghidupan negara. Boleh saja mengambil definisi lain, selain pendapat tersebut, mungkin lebih senang definisi lain, tetapi supaya tepat, harus disebutkan sumber bukunya dan penulis serta definisi itu sendiri secara lengkap.

1.2 Pendekatan (approach) dan Analisis Para Ahli Ilmu Politik

Pendekatan para ahli dalam menulis ilmu politik berbeda, karena dari pangkal tolak pemikiran para ahli itu sendiri.berbeda. Ada pendekatan dari segi sejarah dan melihat sejarah sebagai pisau analisa untuk mengerti tentang masalah politik yang sedang berkembang. Ada yang melihat politik itu sebagai suatu proses sejarah dan mengatakan bahwa sejarah pada dasarnya tiga dimensi sejarah bahwa masa sekarang tidak terlepas dengan sejarah masa lalu, dan keadaan sekarang juga tidak akan terlepas dengan masa depan. Ada yang mengatakan bahwa sejarah berulang, tentunya tidak akan presis.

Ada pendekatan dari segi sosiologi politik yang meihat negara sebagai kelompok penguasa dan ruling kelas. Ada pendekatan dari hukum tatanegara, melihat lembaga politik dan pembagian kekuasaan. Ada yang melihat dari segi filsafat, melihat negara sebagai ideal transenden dan tentu yang melihat dari segi kekuasaan dan diyakini pendekatan ini merupakan ciri utama dalam ilmu politik sampai dewasa ini, dengan ciri ini dan masih ada yang lain pendekatan. Kita akan mengerti tatkala kita membaca suatu buku referensi ilmu politik, kita akan tahu dari segi mana pendekatan penulis yang bersangkutan.

Tetapi harus diingat apa yang terjadi, ketika kita mencoba mengerti lebih mendalam suatu topik politik, ternyata kita tidak berjalan dengan satu alur saja , tetapi disana sini kita terlibat dengan banyak unsur lain lagi, sehingga kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu pengertian yang utuh kalau kita tidak memperhatikan juga sisi yang lain itu. Dan kalau sikap ini kita lakukan kita sudah melibatkan diri dalam suatu pemikiran kompleks dan itu disebut komprehensif. Dalam analisis ilmu pengetahuan kita tidak menemukan istilah ini yang ada ialah multidisplin dan interdisipiliner. Istilah ini ialah istilah mengenai metodologi analisis. Dari segi metode, kedua istilah itu berbeda baik

dalam konsepnya maupun aplikasinya, jadi istilah itu harus tepat digunakannya. Kita tidak mengulasnya disini lebih luas, tetapi sepintas dibedakan, kalau analisis multidisiplin itu lebih mudah digunakan dibandingkan metode interdisipliner.

Seperti sama halnya dengan metode induktif dan metode deduktif dalam hal kita ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode deduktif lebih mudah dipakai dibandingkan dengan metode induktif. Singkatnya kalau tugas analisis deduktif, cukup kita mulai dengan menganalisis teori-teori kemudian mengambil kesimpulan kesimpulan, sedangkan analisis induktif, kita harus mulai dengan mengumpulkan data lapangan yang cukup banyak dan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan-kesimpulan, Dalam ianalisis data politik, metode induktif ini merupakan tantangan dalam upaya mengembangkan ilmu, bayangkan yang kita maksud dengan data lapangan adalah data yang dilihat sebagai datum yang cepat berubah, bagaimana kita dapat suatu generalisasi yang valid dan bertahan. Kita coba teruskan pembicaraan pada paragraf berikut.

1.3 Teori dan Praktek dalam Ilmu Politik

Sepintas, kalau berfikir datar, teori dan praktek, dua istilah sudah lazim dan tidak ada masalah. Cukup teorinya diketahui, tentu mudah untuk dipraktekan. Judul kita adalah teori dan praktek dalam ilmu politik, inipun kelihatannya cukp simpel saja, teorinya bagaimana, prakteknya mengikuti teori saja. Tetapi dimaksud disini lebih dari itu. Kalau dalam ilmu-ilmu sosial, teori itu sesuatu yang ideal, langsung orang mengkaitkannya dengan sesuatu yang realis. Kalau dua kata ini dimunculkan, lansung orang pasang kuda-kuda, berdebat ! Sesuatu yang belum diterima umum, pasti debat dan berkepanjangan. Dalam kaitan inilah penting dicamkan oleh mahasiswa beberapa masalah ketika hendak mempelajari dengan baik ilmu politik.

Sebagai contoh misalnya dalam ilmu administrasi negara, ketika Dean Roscoe Pund mengatakan bahwa ilmu administrasi tidak punya teori yang dirumuskan dengan baik, langsung diprotes keras oleh Emmette Redford dengan mengatakan hal itu sebagai suatu tuduhan menentang ilmu administrasi. Pada hal ilmu administrasi ini sudah lama dan sudah cukup tua berdiri sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Redford tidak sekedar menampik tuduhan itu, tetapi beliau membuktikan bahwa tuduhan itu tidak tepat.

Jadi, ada masalah debat besar, ketika istilah-istilah itu dimunculkan. Roger H Soltau dalam bukunya " An Introduction to Politics" pada awal penjelasannya mulai dengan mengingatkan bahwa ada beberapa masalah yang diperhatikan oleh mahasiswa ketika mereka akan memulai mempelajari ilmu ini ialah :

1. Tentang definisi dari berbagai istilah dalam ilmu politik. Dalam pelajaran ilmu politik kita akan menjumpai berbagai istilah seperti, demokrasi, republik, kedaulatan dan banyak lagi. Pengertian dari istilah itu bisa menimbulkan intepretasi berbeda dari setiap orang, jadi harus ada kehati-hatian dalam memakai suatu istilah, apa sesungguhnya arti atau makna atau definisi dari itilah tersebut, baik dari kita sendiri dan ataupun dari orang lain pemakai istilah dimaksud.. Jadi jalan keluarnya ialah dalam memakai suatu istilah kita haus pastikan dalam arti apa istilah itu dipakai, sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat kamus. sesuatu istilah ternyata terdapat serentetan pengertian dari istilah itu. Sebab itu dari sekian pengertian itu, pilih dalam arti apa istilah kita mengartikannya, atau dalam referensi kita dapati pengertian dari orang lain dan dipakai atau tidak dipakai.

Kembali soal debat, ideal dan eksisten (ada). Jangankan dari ahli ilmu praktis seperti kita sebut diatas timbul tebat, para ahli filsafatpun timbul debat keras dan berkepanjangan, soal apakah itu yang disebut "real", "riil". Untuk menimbulkan sikap rasional, berfikir logis dan bahan diskusi di kelas, kita bertanya, apakah kursi ?. Reaksi orang, pertanyaan itu mudah dijawab, tetapi meleset. Tidak tahu bahwa tujuan pertanyaan itu ialah menanyakan suatu

definisi atau pengertian tentang kursi. Pertanyaan langsung dijawab bahwa kursi adalah ini dan itu, menandakan orang tidak mempunyai nalar yang baik, pada hal justeru disinilah letaknya awal dari segala seuatu berfikir ilmiah. Definisi kursi terbukti tidak ditehui dengan benar. Kalau orang mulai berfikir kritis akademik, saat itulah mulai timbul ingin tahu mengenai sesuatu itu harusnya dilihat dengan benar dan diharapkan sikap ini berkembang dengan bagus dalam diri orang yang sedang belajar.
Orang mulai belajar, definisi menunut orang berfikir teratur dan tepat. Kalau suatu definisi sudah ada mengenai sesuatu,maka caranya adalah sebut definisi itu pemilik definisi, dan sebut lengkap rumusan definisinya. Sikap menyebut suatu definisi yang sudah dimiliki orang lain tanpa menyebut pemiliknya, suatu sikap tidak etis dan tidak dibenarkan bahkan bisa dituduh menjiplak. Disini dituntut sikap menghormati atau penghormatan terhadap karya orang lain, dan kita harus dengan jujur mengatakan menurut pendapat yang bersangkutan itu. Kalau tidak ada definisi yang eksis, maka barulah orang berkata menurut pendapatnya sendiri. Terbukti definisi tentang kursi, tidak lengkap dan tidak utuh, karena kursi dipresepsi sebagai berkaki empat, pada hal ada kursi hanya satu kakinya, tidak hanya terbuat dari kayu, tidak saja digunakan untuk duduk.
Kalau diskusi seperti ini tadi terjadi dikelas, besar harapan kita mutu pendidikan kita akan berkembang dengan baik. Masalah definisi setiap istilah dalam studi ilmu politik menjadi syarat mutlak dilakukan.

2. Studi ilmu politik itu berkaitan soal presepsi setiap orang dan kepentingan setiap orang, tentang bagaimana bersikap dan sikap politik, biasanya orang enggan atau takut menyatakan sikap politiknya, mengapa ? Mengapa seolah takut kalau berbeda, atau kalau berbeda ber-arti musuh,kalau musuh yang akan terjadi ialah sikap saling ingin melenyapkan. Sikap yang diperlukan ialah menurut Soltau ialah sikap legowo, " humble mind," sikap yang masih sulit bisa berkembang dinegeri kita yang Pancasila ini, dibelakang kita ialah bendera Merah Putih

BAB II
TEORI POLITIK TENTANG DASAR DAN TUJUAN NEGARA

2.1 Jalan Menuju Teori Politik Indonesia dan Praktek Negara yang Kuat

Dari uraian dalam buku ini kita akan simpulkan bahwa sekitar empat ketegori dasar tentang dasar negara dari berbagai penjuru dunia ini ialah filsafat liberalisme, filsafat marxisme dan filsafat negara Islam dan dasar negara Indonesia, Pancasila , serta masih ada negara-negara yang tidak begitu jelas filsafatnya. Atau ada juga penggolongan dalam liberalisme, demokrasi dan totaliter. Teori politik barat berbicara tentang "the purpose of the state" dan menurut Soltau "The purpose of the state" menyatu dengan "way of life" dari semua anggota masyarakat negara itu. Dari sisi ini, jelas arah analisis berikut tentang dasar dan tujuan negara Indonesia, pemikiran menuju teori politik Indonesia dan praktek masa depan model negara Majapahit yang bersatu dan kuat., kita akan menyimpulkan sebagai berikut.

1. Negara Indonesia itu ada pada tahun , 17 Agustus 1945. Unsur-unsurnya ada dan terpenuhi menurut kriteria hukum internasional.
2. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipsahkan dengan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
3. Negara itu adalah Negara Pancasila.
4. Tujuan Negara Pancasila itu adalah Liberty, Unity, Soveringnty, Social Justice and Welfare State.
5. Pancasila dan Pasal Pasal Undang Undang Dasar 1945 terkait dan tidak dapat dipisahkan.

2.2 Pemikiran Reflektif dari Teori Barat dan Mengisi Kemerdekaan dengan Membangun, akan disimpulkan sebagai berikut

1. Menganalisis teori barat dengan kritik, tujuannya untuk menggali pemikiran yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. melalui penelitian dibidang ekologi, administrasi negara dan pembangunan.

2. Menganalisis dengan kritik mengenai teori pembangunan barat dan dampaknya terhadap masyarakat terjajah yang serba terbelakang dengan konsep membangun manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan, berawal dari hulu ke hilir mulai dengan perbaikan gizi sebagai suatu gerakan nasional.

3. Menganalisis konsep Manajemen Nasional yang holistik integralistik.

4. Menganalisis tentang bagaimana menghasilkan pemerintah yang kuat.

5. Menganalisis tentang kiat-kiat Mengembangkan Ilmu Pengetahuan.

2.3 Pemikiran Aplikatif Mengenai Masalah Kepentingan Umum di Indonesia, akan disimpulkan sebagai berikut

1. Perlunya Metode Pemahaman dan Pengamalan Pancasila yang tidak indokrinatif.

2. Perlunya pengembangan "preemptive control" melalui perbaikan sistem hukum dan kewenangan, tidak saja untuk bencana alam, tetapi juga bidang kesehatan dan dibidang politik dan keamanan.

3. Perlunya gerakan sosial dan LSM yang mendukung program lingkungan hidup.

dalam rangka peran serta masyarakat dalam program pemerintah "Public Good Governance"

4. Perlunya perbanyakan proyek rekreasi bagi masyarakat disediakan oleh Masyarakat dan difasilitasi pemerintah

5. Perlunya dikembangkan dan dilembagakan konsultasi gizi dan gerakan gizi nasional oleh masyarakat untuk masyarakat.

BAB III
TEORI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN REGIONAL

3.1 Teori Pembangunan akan Menyimpulkan untuk Fokus Pada Nilai Lokal Masyarakat pada Perencanaan Pembangunan di Daerah

1. Pola pikir dan pola tindak pemerintah pusat dan daerah konsisten holistik integralistik, teladanisme dan kreatif inovati dalam rangka perlunya "the national managerial system".

2. Mengikuti pola pemikiran alternatif yang berorientasi pada kebutuhan, bersifat endogen, bersifat mandiri, secara ecologis, berdasarkan transformasi struktural.

3. Fokus pada penerapan Teori "the never ending search for the Public Ineterst".

4. Fokus pada Pembangunan berwawasan Lingkungan (Ecodevelopment).

5. Pembangunan dan pemekaran daerah harus dibuktikan terlebih dahulu pentingnya dan terpenuhinya kepentingan sosial ekonomi masyarakat sendiri dan tidak justeru menjadi beban, moratorium perlu.

3.2 Konsep Perencanaan Pembangunan Regional, disimpulkan sebagai berikut

1. Hal yang kurang bermanfaat untuk satu daerah dialihkan ke kepentingan yang lain yang dinilai lebih produktif.

2. Memperhatikan mekanisme pasar. Daerah menjadi ujung tombak pembangunan.

3.3 Kesimpulan Pembangunan antar Sektor dan antar Daerah

1. Merobah sikap yang kurang mendukung pembangunan, menjadi mendukung.

2. Cara mengatur pemerintahan dan pembangunan yang menghasilkan pemerintah yang kuat, stabil dan makmur, sperti zaman Majapahit dan Sriwijaya.

BAB IV
PENGEMBANGAN DISIPLIN ILMU BERBASIS ILMU POLITIK

4.1 Ilmu-ilmu Sosial Politik disimpulkan tergolong "laison", "power" dan "rating"

1. Semua program studi tergolong "ilmu laison", tetapi unitnya berbeda.

2. Semua program studi tergolong "ilmu power" tetapi unitnya hampir semua sama.

3. Semua program studi tergolong "ilmu rating" dan cocok untuk pengembangan ICT.

4.2 Tugas Pengembangan Disiplin Ilmu

1. Program studi mengembangkan satu disiplin ilmu.

2. Metodologi dengan pendekatan pluralistik, komprehensif, behavioral, kualitatif kuntitatif.

4.3 Dasar dan Tujuan Politik Indonesia ialah Falsafah Pancasila, disimpulkan pengembangannya melalui

1. Pendidikan Pancasila.
2. Sistem Politik Indonesia dan Undang Undang Dasar 1945.
3. Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Ilmu Sosial Dasar dan Kapita Selekta.
5. Tujuan politik Indonesia, "Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur"